



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NEWSLETTER

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA | JANUARI | 2026



**APBN 2025 TETAP KUAT,
BEKERJA KERAS UNTUK INDONESIA**
Adaptif Mendukung Program Prioritas,
Responsif di Tengah Dinamika dan Tantangan

Foto: Unsplash



#KATAMENTERIKITA

“

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Capaian program prioritas dan tata kelola terus kita jaga. Defisit 2025 di level 2,92 persen, antara lain untuk mendukung stimulus yang diperlukan oleh perekonomian, sehingga masyarakat bisa menikmati ekspansi ekonomi.

Kerja Keras APBN 2025 di Tahun Pertama Pemerintahan Baru: **Mengantisipasi Risiko, Mendukung Agenda Prioritas**



APBN 2025 dihadapkan pada konteks yang tidak biasa, direncanakan dan ditetapkan di tahun 2024 pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun mulai dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. Di paruh pertama pelaksanaan APBN, dinamika global bergerak cepat dan penuh ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, APBN diarahkan melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan agenda prioritas segera berjalan.

APNB 2025 merupakan APBN tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski disusun pada periode pemerintahan sebelumnya, pelaksanaan APBN 2025 sejak awal diarahkan selaras dengan visi dan agenda pemerintahan baru.

20 Oktober 2024 menjadi tanda dimulainya Pemerintahan baru dengan penguatan struktur kelembagaan. Pemerintah juga menetapkan Asta Cita sebagai paradigma pembangunan nasional yang menjadi arah kebijakan 5 tahun ke depan. Dalam konteks ini, APBN 2025 dirancang menjadi pondasi awal dimulainya berbagai agenda dan program prioritas, dan akan dikelola secara responsif dan adaptif untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Memasuki tahun 2025, di tengah situasi ketidakpastian global dan pemulihan ekonomi domestik saat itu, Pemerintah harus mengambil opsi penyesuaian kebijakan secara terukur dan selektif. Di antara

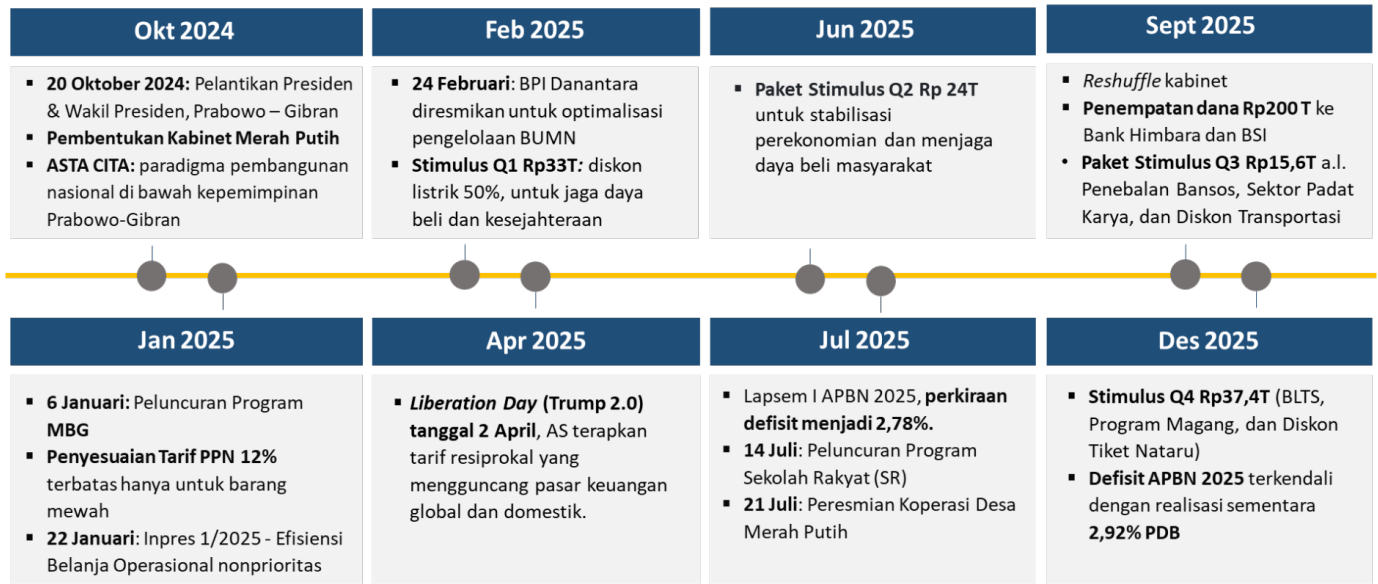
penyesuaian tersebut adalah diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terbatas pada kelompok barang mewah.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN pada 22 Januari 2025. Melalui kebijakan ini, Pemerintah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, serta belanja yang tidak memiliki output terukur. Anggaran tersebut direalokasikan ke program-program prioritas dan belanja yang semakin fokus pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti program MBG, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah bergerak cepat mengeksekusi program prioritas pemerintahan baru, dimulai dengan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada Februari 2025, langkah kelembagaan diperkuat melalui pembentukan Danantara, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan daya ungkit investasi Pemerintah dan optimalisasi pengelolaan BUMN secara lebih terintegrasi.

Lini Masa APBN dan Ekonomi 2025



Seiring dengan berlakunya UU tersebut, mekanisme pengelolaan dividen BUMN juga mengalami penyesuaian dan turut memengaruhi struktur penerimaan negara, khususnya pada PNPB Kekayaan Negara Dipisahkan.

Di tengah upaya Pemerintah menjalankan agenda pembangunan nasional, perekonomian global menghadapi berbagai risiko, antara lain volatilitas harga komoditas, ketegangan geopolitik, serta penyesuaian kebijakan moneter global. Dinamika tersebut semakin terasa pada 2 April 2025 saat diumumkannya *Liberation Day* oleh Amerika Serikat mengenai penerapan kebijakan tarif resiprokal yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan volatilitas pasar keuangan global dan domestik.

Merespons dinamika tersebut, Pemerintah semakin proaktif dan intensif dalam melakukan diplomasi ekonomi dan perdagangan. Pemerintah juga terus memperluas dan memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral untuk menjaga akses pasar ekspor, menarik arus investasi, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli

masyarakat dan dunia usaha, Pemerintah merespons dengan menerbitkan Paket Stimulus I pada awal tahun 2025. Paket stimulus ini diarahkan untuk menopang konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi, khususnya bagi rumah tangga, UMKM, sektor padat karya, dan sektor perumahan, antara lain melalui diskon tarif listrik, PPN DTP perumahan, PPN DTP tiket pesawat, perluasan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pembiayaan bagi industri padat karya, serta insentif otomotif.

Pemerintah melanjutkan peluncuran Paket Stimulus II hingga IV pada Juni, September, dan Oktober 2025. Rangkaian stimulus lanjutan ini difokuskan pada penguatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial yang lebih luas, antara lain melalui diskon tarif transportasi, penebalan bantuan sosial, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dukungan bagi sektor pariwisata dan UMKM, program padat karya dan magang, serta insentif lainnya yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Memasuki paruh kedua tahun 2025, Pemerintah menyampaikan Laporan Semester (Lapsem) pelaksanaan APBN, dengan

perkiraan *outlook* defisit yang meningkat menjadi 2,78 persen PDB seiring moderasi penerimaan negara serta kebutuhan stimulus dan penyesuaian kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada periode ini, berbagai program prioritas pemerintahan baru terus dijalankan dan diperluas, antara lain Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) pada 21 Juli 2025, serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 15 September 2025.

Pemerintah juga menempatkan dana pada Bank Himbara sebesar Rp200 triliun pada 12 September 2025 dan Rp76 triliun pada 12 November 2025 sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Strategi tersebut mendorong penurunan biaya dana (*cost of fund*), meningkatkan penyaluran kredit, serta menggerakkan sektor riil.

Di tengah berbagai dinamika serta tantangan global dan domestik, APBN 2025 tetap ekspansif dan adaptif dalam menjalankan peran melindungi masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan kredibilitas yang tetap terjaga. APBN 2025 ditutup dengan defisit yang terkendali pada level 2,92 persen PDB.



Perkembangan Ekonomi Sepanjang 2025 Resilien dan Stabil di Tengah Berbagai Dinamika

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global bergerak sangat dinamis. Pada awal tahun, sentimen pasar dan ekonomi global tertekan dampak eskalasi perang dagang, meningkatnya kecenderungan proteksionisme, volatilitas harga komoditas, serta diperparah oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan stagnasi ekonomi Eropa.

Memasuki paruh kedua, tekanan global berangsur menurun seiring tensi perang dagang yang mereda dan stabilitas pasar keuangan. Kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih besar dari perkiraan menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan global, khususnya pada *Emerging Markets*.

Di tengah dinamika tersebut, fundamental ekonomi domestik tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Setelah sempat melambat pada Triwulan I di level 4,87 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi kembali menguat pada Triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy) dan tetap terjaga pada 5,04 persen (yoy) pada Triwulan III 2025. Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang mencerminkan kuatnya permintaan domestik.

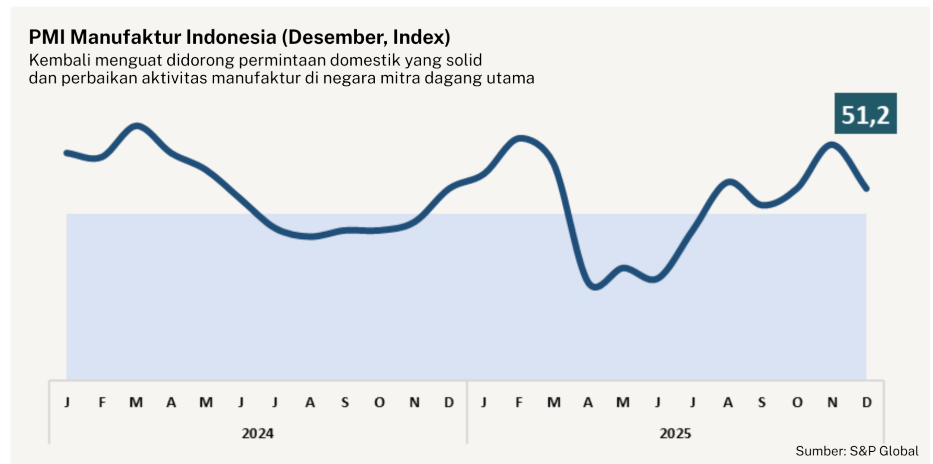
Stabilitas ekonomi juga tergambar dari inflasi yang tetap terkendali pada level 2,92% (yoy) di bulan Desember, mendukung daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas usaha.

Kinerja inflasi dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang *volatile* (cabai, beras, dan ikan segar) akibat gangguan cuaca dan distribusi. Inflasi inti tetap stabil dan inflasi *administered prices* relatif rendah. Inflasi berada dalam rentang sasaran, ditopang oleh kebijakan harga yang terjaga, penguatan peran Bulog, serta efektivitas koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga terkait.

Di tengah gejolak perdagangan global, kinerja sektor eksternal tetap solid. Neraca perdagangan periode Januari–Desember 2025 mencatat surplus sebesar USD46,0 miliar (estimasi Kementerian Keuangan), meningkat 46,8% (*cumulative to cumulative*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penguatan kinerja eksternal terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sebesar 6,2% (yoy), terutama di sektor industri pengolahan yang semakin berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

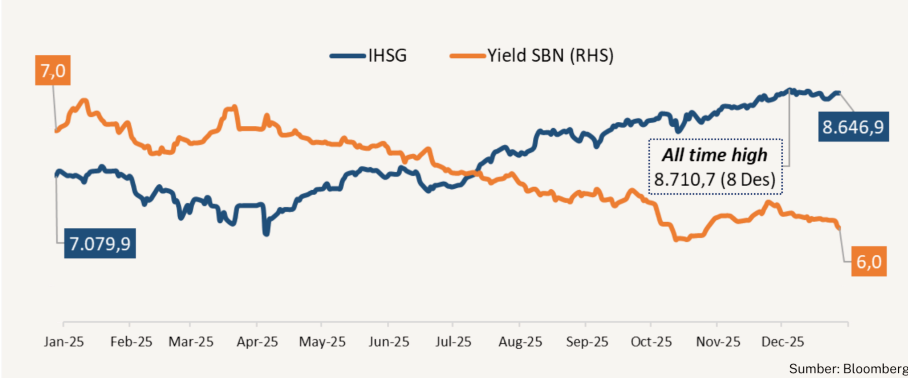
Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan selama 68 bulan berturut-turut, bersama dengan arus masuk modal asing di pasar keuangan, turut memperkuat posisi eksternal Indonesia dan berkontribusi terhadap peningkatan cadangan devisa. Pada Desember 2025, cadangan devisa tercatat mencapai USD156,5 miliar, mendekati level tertinggi yang dicapai pada Maret 2025.

Perkembangan ini sejalan dengan kinerja manufaktur Indonesia yang semakin menunjukkan tren positif. *Purchasing Managers' Index* (PMI) kembali ekspansif di level 51,2 pada Desember 2025, setelah sempat berkontraksi pada periode April hingga Juli. Penguatan ini didorong permintaan domestik yang solid dan didukung perbaikan aktivitas manufaktur di negara mitra dagang utama, sehingga membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia.



Kepercayaan Investor di Pasar Keuangan Domestik Terus Membaik

Gencatan perang dagang AS-Tiongkok dan pemangkasan suku bunga The Fed lebih agresif mendorong optimisme dan sentimen positif.



Sejalan dengan perbaikan indikator makro dan sektor riil, kepercayaan investor di sektor keuangan juga terus membaik. Pada Triwulan IV 2025, tekanan global yang semakin menurun mendorong perbaikan sentimen pasar. Imbal hasil Surat Berharga Negara/yield SBN tenor 10 tahun mencapai 6,01 persen pada akhir 2025, jauh menurun dibandingkan dengan posisi akhir 2024 yang masih berada di atas 7 persen. Penurunan *yield* ini menjadi bukti peningkatan kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi dan konsistensi kebijakan fiskal. Arus modal asing juga kembali menguat, khususnya di pasar SBN. Sepanjang 2025, investor nonresiden mencatatkan beli bersih SBN (*net inflow*) sebesar Rp2,01 triliun, dengan *inflow* bulan Desember mencapai Rp6,49 triliun. Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai rekor tertinggi (*all time high*) 8.710,70 pada 8 Desember 2025 dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi Rp 16.000 triliun di tanggal yang sama. Hal ini didukung oleh stabilitas ekonomi, kinerja emiten yang membaik, serta optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah bergerak relatif stabil sepanjang 2025, meskipun sempat menghadapi tekanan pada periode tertentu. Tekanan terutama terjadi pada Triwulan II seiring meningkatnya eskalasi perang dagang global yang memicu volatilitas pasar keuangan, serta pada Triwulan III 2025 seiring

meningkatnya sentimen risiko domestik. Namun demikian, secara keseluruhan tahun, stabilitas nilai tukar tetap terjaga, didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, serta sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Likuiditas pasar juga membaik dengan pertumbuhan *base money* (M0) hingga 11,4% (yoy) pada Desember 2025. Hal itu didukung kebijakan penempatan dana Pemerintah pada perbankan komersial, khususnya Bank Himbara. Selain memperkuat likuiditas pasar uang, kondisi ini juga mendukung kelancaran intermediasi keuangan, menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi penurunan biaya pendanaan dan peningkatan pembiayaan ke sektor riil.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan fiskal sepanjang 2025 juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Harga minyak mentah (ICP) mengalami tekanan seiring pelemahan permintaan global dan peningkatan pasokan. ICP USD67,95 per barel pada November 2025, di bawah asumsi APBN. Harga gas alam relatif moderat di kisaran USD4,1 per MMBtu pada akhir tahun. Sementara harga batubara bergerak lebih dinamis, sempat melemah pada awal 2025 seiring normalisasi permintaan global, sebelum kembali menunjukkan perbaikan pada Triwulan IV 2025.

Pada sektor pertambangan, harga nikel cenderung menurun dibandingkan puncaknya pada Triwulan II 2024, dipengaruhi peningkatan kapasitas produksi global serta penyesuaian permintaan. Dinamika harga komoditas tersebut memberikan tekanan pada penerimaan negara, baik dari perpajakan maupun PNBp, terutama yang berbasis sumber daya alam. Meski terdapat kenaikan pada *lifting* minyak dan gas. Data sementara per November 2025 menunjukkan realisasi *lifting* minyak dan gas masing-masing mencapai 577,6 ribu barel per hari dan 965,5 ribu barel setara minyak per hari. Kinerja *lifting* migas tetap terjaga dan dioptimalkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi.

Ekonomi yang stabil dan kondisi fiskal yang terjaga sepanjang 2025 menjadi fondasi penting yang memberikan ruang bagi APBN untuk terus menjalankan peran melindungi masyarakat dan menjadi penopang ekonomi ke depan.

REALISASI INDIKATOR EKONOMI MAKRO DIBANDINGKAN ASUMSI APBN 2025

Pertumbuhan Ekonomi (yoy) 5,2%	5,2% Outlook 2025
Inflasi (yoy) 2,5%	2,92% Desember 2025
Nilai Tukar Rp16.000/USD	Rp16.475/USD (ytd) Rp16.782/USD (eop) 31 Desember 2025
Yield SBN 10 Tahun 7,0% (ytd)	6,71% (ytd) 16 Desember 2025 6,01% (eop) 31 Desember 2025
Harga Minyak Mentah (ytd) USD82/barel	67,95 November 2025
Lifting Minyak (barel/hari) 605 ribu	577,6 ribu November 2025
Lifting Gas (barel setara minyak/hari) 1.005 ribu	965,5 ribu November 2025

Sumber: Kemenkeu, BI, SKK Migas, BPS, K-ESDM

APBN 2025: Kebijakan Fiskal yang Adaptif Menjaga Stabilitas dan Mendukung Agenda Prioritas

Di tengah dinamika global yang bergerak cepat dan fluktuasi harga komoditas, APBN 2025 memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan yang adaptif. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi masyarakat dari dampak dinamika global, serta memastikan agenda prioritas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, tanpa mengorbankan disiplin dan kredibilitas fiskal.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi sementara menunjukkan APBN 2025 adaptif dan dikelola secara hati-hati. Sejalan dengan dinamika pelaksanaan kebijakan dan upaya menjaga momentum perekonomian, realisasi sementara defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun, tetap terkendali dalam batas aman sebesar 2,92 persen terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp180,7 triliun. Defisit APBN dipenuhi dengan pembiayaan utang yang efisien dan *manageable*, serta pembiayaan non-utang yang diarahkan semakin produktif.

Pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun, dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun dan terus ditingkatkan efisiensinya, sehingga program-program prioritas dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN untuk mempercepat

Realisasi Sementara APBN hingga 31 Desember 2025

Realisasi sementara, masih terdapat potensi tambahan pendapatan negara dan belanja

URAIAN (dalam Triliun Rupiah)	LKPP 2024 (Audited)	APBN 2025	OUTLOOK (Lapsem 2025)	REALISASI (Des 2025)	% thd APBN
PENDAPATAN NEGARA	2.850,6	3.005,1	2.865,5	2.756,3	91,7
PENERIMAAN PERPAJAKAN	2.231,8	2.490,9	2.387,3	2.217,9	89,0
Penerimaan Pajak	1.931,6	2.189,3	2.076,9	1.917,6	87,6
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	300,2	301,6	310,4	300,3	99,6
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	584,4	513,6	477,2	534,1	104,0
PENERIMAAN HIBAH	34,4	0,6	1,0	4,3	733,3
BELANJA NEGARA	3.359,8	3.621,3	3.527,5	3.451,4	95,3
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.496,2	2.701,4	2.663,4	2.602,3	96,3
Belanja K/L	1.324,0	1.160,1	1.275,6	1.500,4	129,3
Belanja non-K/L	1.172,2	1.541,4	1.387,8	1.102,0	71,5
TRANSFER KE DAERAH	863,5	919,9	864,1	849,0	92,3
KESEIMBANGAN PRIMER	(20,7)	(63,3)	(109,9)	(180,7)	285,3
DEFISIT ANGGARAN	(509,2)	(616,2)	(662,0)	(695,1)	112,8
% Defisit terhadap PDB	(2,30)	(2,53)	(2,78)	(2,92)	
PEMBIAYAAN ANGGARAN	554,9	616,2	662,0	744,0	120,8
SILPA/(SIKPA)	45,7	-	-	48,9	

pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjalankan fungsi *shock absorber* dalam melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai langkah reformasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui penguatan pendapatan negara (*collecting more*), belanja yang semakin efektif dan berorientasi hasil (*spending better*), serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan (*efficient and sustainable financing*).

Pendapatan Negara Terjaga di Tengah Kondisi yang Menantang
Pendapatan negara sepanjang 2025 dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, terutama akibat moderasi harga komoditas dan gejolak global. Meski demikian, secara keseluruhan kinerja pendapatan negara tetap terjaga

Hingga akhir 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.756,3 triliun, antara lain terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun (89,0 persen dari APBN) dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun (104,0 persen dari APBN).

Penerimaan pajak bruto mencapai Rp2.278,8 triliun, tumbuh 3,7 persen (yoy). Sementara secara neto, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.917,6 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi sebagai konsekuensi relaksasi kebijakan dan percepatan pemeriksaan.

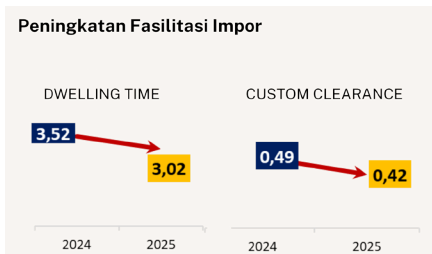
Kinerja penerimaan pajak menunjukkan perbaikan yang signifikan pada Semester II (*turnaround*), setelah tekanan pada Triwulan I. Perbaikan ini didukung oleh menguatnya aktivitas ekonomi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Dari sisi sektoral, penerimaan pajak sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, serta keuangan dan asuransi menunjukkan pemulihan pada triwulan akhir seiring membaiknya permintaan domestik dan stabilitas sektor keuangan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp300,3 triliun, stabil di tengah volatilitas harga komoditas dan gejolak perdagangan global.

Berdasarkan komponennya, penerimaan cukai yang masih menjadi penopang utama mengalami kontraksi dampak penurunan produksi hasil tembakau. Sementara bea keluar tumbuh kuat didorong kenaikan harga dan volume ekspor CPO dan produk turunannya. Di sisi lain, bea masuk berkontraksi sejalan dengan moderasi pertumbuhan impor dan peningkatan pemanfaatan fasilitas perdagangan internasional (FTA).

Kinerja kepabeanan dan cukai selain sebagai sumber penerimaan negara juga berperan dalam aspek layanan (fasilitasi) perdagangan dan pengawasan. Peningkatan fasilitasi perdagangan antara lain ditunjukkan oleh perbaikan *dwelling time* dan *customs clearance*. *Dwelling time* merupakan waktu yang diperlukan oleh peti kemas mulai dari proses penimbunan sampai dengan keluar kawasan Pelabuhan. *Dwelling time* impor turun dari 3,52 hari di 2024 menjadi 3,02 hari di tahun 2025. Sementara *customs clearance* (waktu penyelesaian proses kepabeanan) dapat dipercepat dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari.



Pengawasan kepabeanan dan cukai terus diperkuat sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun, telah dilakukan 36.453 kali penindakan, yang didominasi oleh penindakan di bidang cukai sebanyak 21.470 kasus. Sementara itu, dari sisi nilai barang hasil penindakan (BHP) mencapai



Rp9,9 triliun, kontribusi terbesar berasal dari impor dengan nilai mencapai Rp7,1 triliun dengan 266 kasus penyidikan dan penerimaan Uang Rampasan sebesar Rp211 miliar. Penindakan rokok ilegal juga meningkat signifikan, dengan jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 1,4 miliar batang (2024: 792 juta), termasuk pengungkapan gudang dengan temuan sekitar 160 juta batang rokok ilegal.

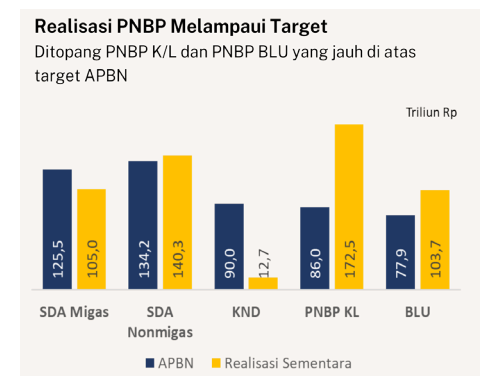
Selain itu, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing dunia usaha, Pemerintah terus menyalurkan insentif perpajakan dan kepabeanan secara terukur. Belanja perpajakan difokuskan untuk mendukung rumah tangga, UMKM, sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, serta investasi, dengan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, berbagai insentif kepabeanan diluncurkan untuk menurunkan biaya logistik dan input produksi, sehingga membantu dunia usaha beroperasi lebih efisien di tengah tekanan global.

PNBP terealisasi sebesar Rp534,1 triliun (104,0 persen dari APBN), melampaui target meskipun dihadapkan pada tekanan moderasi harga komoditas dan penurunan volume produksi batubara. Kontribusi PNBP antara lain berasal dari SDA migas sebesar Rp105,0 triliun, SDA nonmigas Rp140,3 triliun, PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Rp12,7 triliun,

PNBP K/L Rp172,5 triliun, serta PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp103,7 triliun. Kinerja PNBP SDA relatif tertekan sepanjang tahun akibat pergerakan harga komoditas.

Selain itu, pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN juga memengaruhi PNBP KND. Perubahan ini merupakan penyesuaian kelembagaan dalam rangka penguatan peran investasi negara, dan tidak menggambarkan penurunan kinerja BUMN secara fundamental.

Di tengah tekanan tersebut, kinerja PNBP tetap ditopang oleh PNBP K/L yang mencapai 200,5% dari APBN, terutama didorong oleh penegakan hukum (setoran TPK TPPU ganti rugi korupsi CPO dan gula, serta satgas PKH), optimalisasi penerimaan dari spektrum frekuensi radio dan penertiban kawasan hutan. Selain itu, pendapatan BLU terealisasi sebesar 133,0% dari APBN, yang terutama ditopang pendapatan BLU Sawit dan BLU Rumah Sakit.



Belanja Negara Responsif dan Antisipatif Mendukung Program Prioritas

Realisasi Belanja Negara hingga akhir 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Sejak awal tahun, efisiensi dan *refocusing* belanja dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, belanja diakselerasi seiring penajaman prioritas kebijakan dan penyaluran berbagai paket stimulus ekonomi. Pada Triwulan IV, realisasi belanja meningkat signifikan, antara lain untuk penyaluran paket stimulus lanjutan dan penguatan respons penanganan bencana.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.602,3 triliun (96,3 persen APBN), dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan realokasi ke kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaannya, BPP menjalankan peran strategis APBN, yaitu sebagai agen pembangunan (*development agent*), peredam tekanan (*shock absorber*), dan instrumen antisipasi penanggulangan bencana. BPP juga difokuskan pada pelaksanaan program prioritas nasional, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi sektor produktif guna mengakselerasi transformasi ekonomi.

Seiring adanya belanja tambahan dan pergeseran anggaran, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp1.500,4 triliun, tumbuh 13,3 persen (yoy), antara lain untuk mendukung program prioritas Pemerintah dan respons cepat terhadap kejadian bencana. Belanja bansos tumbuh cukup tinggi 20,5 persen (yoy), sejalan dengan strategi Pemerintah untuk terus memberikan stimulus sosial guna melindungi kelompok rentan, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan konsumsi rumah

tangga tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi.

Belanja non-K/L salah satunya direalisasikan dalam bentuk subsidi. Pemerintah menyediakan kuota subsidi yang memadai sampai dengan akhir tahun dalam rangka menjaga daya beli, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai barang bersubsidi seperti BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, pupuk, serta subsidi perumahan.

Hingga 31 Desember 2025, Pemerintah telah menyalurkan subsidi sebesar Rp281,6 triliun, dipengaruhi dinamika asumsi makro dan parameter subsidi (harga minyak mentah, nilai tukar, dan volume). Di sisi lain, penyederhanaan birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penyesuaian HET pupuk turut mendorong distribusi yang lebih cepat dan harga pupuk yang lebih terjangkau bagi petani.

Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari APBN. TKD berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2025, dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan TKD.

Dana Alokasi Umum antara lain dimanfaatkan untuk Gaji ASN Daerah dan PPPK serta penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang dilakukan lebih cepat

dan langsung ke rekening penerima. Dana Desa digunakan untuk pembentukan dan penguatan KD/KMP, pembangunan infrastruktur dasar, serta bantuan langsung tunai di desa. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk mendukung operasional sekolah, layanan kesehatan primer, dan penguatan layanan rujukan di daerah.

TKD yang disalurkan ke daerah terus dioptimalkan untuk belanja, namun capaian realisasi belanja APBD 2025 diperkirakan masih rendah. Hal tersebut berdampak pada peningkatan posisi kas pemerintah daerah. *Excess cash* daerah diharapkan dapat segera dimanfaatkan di awal 2026 untuk mempercepat realisasi belanja daerah, khususnya pada belanja produktif dan pelayanan publik, sehingga dampak TKD terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat semakin optimal.

Pelaksanaan program prioritas sepanjang 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, ketahanan sosial, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan SDM melalui pemenuhan gizi, peningkatan partisipasi sekolah, dan peningkatan kesehatan. Dukungan kebijakan lain yang juga menjadi fokus adalah bidang ketahanan pangan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.



Program Prioritas Berdampak Nyata bagi Rakyat

Makan Bergizi Gratis (MBG)
 Program MBG hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi, meningkatkan partisipasi sekolah, serta menggerakkan perekonomian lokal. Hingga akhir 2025, realisasi MBG mencapai Rp51,5 triliun dan menjangkau 53,8 juta penerima (per 7 Januari 2026 menjangkau 56,1 juta penerima), termasuk siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan. Selain dampak gizi dan kesehatan, MBG juga memberikan multiplier effect ekonomi melalui aktivitas 19.343 SPPG yang mempekerjakan 789.319 tenaga kerja serta pemanfaatan bahan pangan lokal dari UMKM dan petani setempat.

Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Revitalisasi Rumah Sakit
 Hingga Desember 2025, CKG telah melayani 70,8 juta penduduk, membantu masyarakat mengenali kondisi kesehatan sejak awal dan menekan biaya pengobatan jangka panjang. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga didukung dengan revitalisasi rumah sakit, khususnya peningkatan kelas dan sarana prasarana layanan prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Penguatan layanan kesehatan ini meningkatkan akses dan kualitas layanan rujukan, terutama di luar wilayah perkotaan besar.

Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan Revitalisasi Sekolah
 Sekolah Rakyat berperan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perluasan akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pembelajaran digital. Hingga akhir 2025, program ini telah memberi manfaat untuk 15.895 siswa serta 6.849 guru dan tenaga kependidikan yang beroperasi di 166 SR. Sekolah Unggul Garuda dan revitalisasi sekolah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM serta kapasitas sains dan teknologi melalui peningkatan sarana, kurikulum, dan pembinaan pendidik, guna menyiapkan talenta unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Realisasi SUG mencapai Rp176,8 miliar utk SUG baru dan transformasi, serta Rp18,9 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah.

Pembiayaan APBN Dikelola dengan Hati-Hati, Terukur, dan Efisien

PEMBIAYAAN APBN 2025			
Realisasi Sementara			
KOMPONEN PEMBIAYAAN APBN <small>(dalam Triliun Rupiah, antara lain)</small>	APBN 2025	REALISASI <small>(Des 2025)</small>	% APBN
PEMBIAYAAN UTANG	775,9	736,3	94,9
PEMBIAYAAN INVESTASI	(154,5)	(86,3)	55,8

Pembiayaan APBN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas Pemerintah dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dari outlook Laporan Semester II sebesar 2,78 persen, namun tetap berada di bawah batas aman. Pembiayaan APBN 2025 dikelola secara hati-hati dan terukur, tidak hanya untuk menutup defisit, tetapi juga untuk membiayai investasi strategis serta mendukung pengelolaan kas negara yang efisien agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dan tumbuh berkelanjutan.

Pembiayaan utang tetap dikelola secara *prudent* dengan memperhatikan biaya dan risiko. Hingga 31 Desember 2025, pembiayaan utang terealisasi sebesar Rp736,3 triliun, lebih rendah Rp39,6 triliun dari target APBN. Lebih rendahnya realisasi tersebut didukung oleh pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun, sehingga kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi tanpa meningkatkan risiko fiskal.

Dalam kerangka pembiayaan non-utang, pembiayaan investasi berjalan *on-track* dengan realisasi mencapai Rp86,29 triliun. Pembiayaan ini diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain pendidikan, perumahan bagi MBR, ketahanan pangan, pelayanan publik, serta konektivitas antardaerah. Selain itu, investasi Pemerintah juga dioptimalkan untuk memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi.

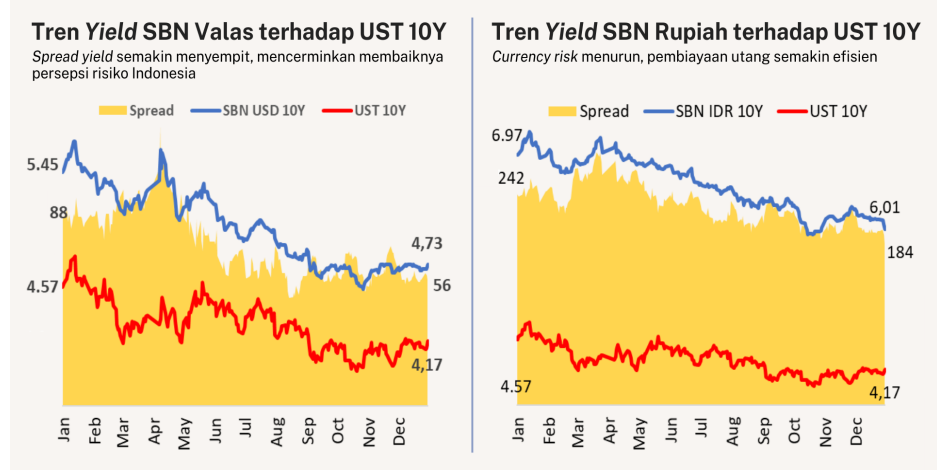
Sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas negara yang efisien dan mendukung stabilitas sistem keuangan, Pemerintah melakukan penempatan dana di Bank Himbara. Penempatan dana yang dilakukan sebesar Rp200 triliun pada September dan Rp76 triliun pada November 2025 meningkatkan likuiditas perbankan, sehingga suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito cenderung menurun. Kondisi pendanaan yang lebih longgar ini memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dengan biaya yang lebih efisien, sehingga mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Terjaganya kinerja pembiayaan utang tidak lepas dari upaya mengelola dinamika pasar SBN. Penerbitan SBN di pasar perdana sepanjang 2025 berkinerja stabil dan solid dengan rata-rata *incoming bid* lelang berada di kisaran tiga kali lipat target (SUN 3,2 kali dan SBSN 3,4 kali). Kuatnya permintaan investor tersebut mendukung tren penurunan imbal hasil

SBN hingga 6,01 persen, turun 96 bps dibandingkan awal tahun. Penurunan imbal hasil ini berdampak positif dan membantu menjaga efisiensi biaya utang APBN.

Penerbitan SBN sepanjang 2025 juga didukung oleh strategi penguatan dan diversifikasi basis investor melalui SBN Ritel. Partisipasi masyarakat pada SBN Ritel terus meningkat, didominasi oleh investor milenial sekitar 50 persen dan generasi Z sekitar 6 persen. Keberadaan investor dari generasi tersebut penting sebagai basis investor SBN di masa depan.

Di pasar internasional, inovasi pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan perdana Kangaroo Bond senilai AUD800 juta dan debut penerbitan Dim Sum Bond senilai CNH6 miliar yang berhasil menarik investor cukup kuat dan memperluas sumber pembiayaan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar dan mata uang tertentu.



Seiring dengan itu, penyempitan selisih (*spread*) yield SBN valas terhadap yield US Treasury tenor 10 tahun yang turun signifikan dari 88 bps pada Januari menjadi 56 bps menunjukkan bahwa *country risk* Indonesia terus menurun. Penurunan *country risk* juga diikuti oleh penurunan risiko nilai tukar (*currency risk*), dengan *spread yield* SBN Rupiah terhadap US Treasury tenor 10 tahun yang semakin rendah dan berada di level 184 bps, jauh membaik dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar 242 bps, serta menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara *peers*.

Secara keseluruhan, APBN 2025 dikelola secara solid di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan. Melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, terukur, dan kredibel, APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan berbagai program prioritas Pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

INOVASI INSTRUMEN PEMBIAYAAN 2025: DEBUT PENERBITAN KANGAROO BOND DAN DIMSUM BOND

Memperluas basis investor dan mendapatkan respon sangat positif

Kangaroo Bond
AUD800 Juta

14 Agustus 2025



Tenor 5 Tahun: AUD500 juta dengan *yield* 4,427%

Tenor 10 Tahun: AUD300 juta dengan *yield* 5,380%

- Debut di pasar Kangaroo Bond dengan *yield* kompetitif dan *order book* 10x
- Mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap stabilitas dan kredibilitas fiskal Indonesia, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Australia



Memperoleh penghargaan:

- **Domestic Bond of the Year** (IFR Asia Awards)
- **Best Bond Deal** (Finance Asia Achievement Awards 2025)

Dim Sum Bond
CNH6 Miliar

31 Oktober 2025



Tenor 5 Tahun: CNH3,5 miliar dengan *yield* 2,50%

Tenor 10 Tahun: CNH2,5 miliar dengan *yield* 2,90%

- Penerbitan perdana dalam mata uang Renminbi senilai CNH6 miliar
- Minat investor solid, dengan *order book* 3x termasuk dari investor *onshore* Tiongkok

NEWSLETTER

APBNKiTA

KINERJA DAN FAKTA

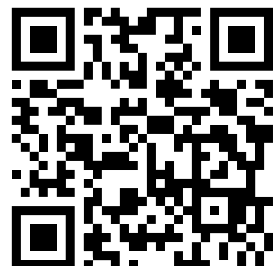
Newsletter ini merupakan versi ringkas dari Paparan Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KiTa. Publik dapat mengakses diseminasi APBN KiTa lainnya, yaitu Bahan Paparan dan Buku APBN KiTa melalui QR Code yang tersedia di halaman ini.

Temukan versi APBN KiTa selengkapnya di sini.

Narahubung media:

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
+62813-1000-4134

Hidayat Amir
Direktur Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Kementerian Keuangan
sekretariat.alco@kemenkeu.go.id
+62821-2484-9458



Edisi IV | Januari 2026 disusun oleh:
Aulia Wahyu M. (Penulis), M. Hilman Nursyahada (Editor),
I Gede Yuddy Hendranata (Penanggung Jawab) dan Aditya W. (Cover)
Tim Sekretariat ALCO Kementerian Keuangan